

Partisipasi publik dalam *budgeting*: *Lesson learned* untuk Indonesia

Ruth Silvia ^{a*}, Achmad Lutfi ^b

Universitas Indonesia. Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

^aruth.silvia@ui.ac.id; ^bachmad.lutfi@ui.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Dampak nyata *Participatory Budgeting* (PB) telah dirasakan oleh negara yang mengadopsinya. Di Brazil, *Participatory Budgeting* meningkatkan pendapatan daerah, Di Newyork terjadi perubahan alokasi anggaran berdasarkan keinginan masyarakat, di Republik Ceko, *Participatory Budgeting* telah berhasil meningkatkan jumlah peserta pemilu di negaranya. *Participatory Budgeting* telah menciptakan peluang untuk warga negara dilibatkan, diedukasi, dan diberdayakan. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi penting karena masyarakat merupakan pemilik uang dari pajak yang diberikan kepada pemerintah. *Participatory Budgeting* membantu meningkatkan transparansi dan berpotensi mengurangi inefisiensi pemerintah dan korupsi. Namun *Participatory Budgeting* di Indonesia mengalami permasalahan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan hanya bersifat formalitas saja. Study ini dilakukan untuk melihat bagaimana Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman negara-negara di dunia yang telah menerapkan *Participatory Budgeting*. Pembelajaran dari implementasi *Participatory Budgeting* pada negara di Amerika, Eropa, Asia dan Afrika yaitu bahwa tingkat partisipasi publik dalam proses *Participatory Budgeting* memegang factor kunci. Dengan meningkatkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat, kita mungkin menemukan bahwa kesadaran politik masyarakat dan keterlibatan dalam *Participatory Budgeting* akan terdorong.

Kata Kunci: partisipasi, musrenbang, anggaran, demokrasi

How to Cite: Silvia, R., & Lutfi, A. (2022). *Participatory Budgeting: Lessons for Indonesia*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 113-122. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.902>



Pendahuluan

Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam demokrasi. Menurut Surbakti (2005) asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat sendiri yang akan menerima dampak dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, semakin kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat semakin memaksa masyarakat untuk dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang akan berpengaruh kepadanya.

Menurut Halvorsen (2003) Keterlibatan masyarakat berperan dalam membentuk legitimasi keputusan tertentu serta meningkatkan kepercayaan peserta kepada organisasi, menimbulkan toleransi terhadap pandangan dan ekspektasi pada keputusan publik, menimbulkan kepercayaan warga terhadap kinerja badan dan membangun dukungan publik. Keputusan menjadi lebih diterima dan hubungan dengan warga negara meningkat

Konsep pelibatan masyarakat ini menunjukkan mulai adanya pergeseran paradigma administrasi publik dari *old new public management* kepada *new public service* (nps). Denhardt dan Denhardt (2015) dalam bukunya tentang *New Public Service* mengatakan bahwa di dunia saat ini dan di masa depan banyak orang ingin berpartisipasi dalam keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Semakin banyak keputusan publik, orang-orang yang terpengaruh akan bersikeras untuk didengarkan (Bennis, 2006; Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu pengelolaan Keuangan Publik harus berdasarkan pada kepentingan publik.

Menurut Hadi (2006) dan Salahudin (2012), anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang mencerminkan prioritas kebijakan dalam memutuskan kemana uang harus dibelanjakan dan kemana mesti dikumpulkan. Pengelolaan Keuangan tersebut tidak hanya memperhatikan pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga pada

seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi penting karena masyarakat merupakan pemilik uang dari pajak yang diberikan kepada pemerintah. Sejumlah dana yang telah dimiliki Pemerintah tujuannya untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menggunakan anggaran tersebut agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, di dunia terdapat istilah *Participatory Budgeting* dimana masyarakat turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran di wilayahnya.

Menurut Madej (2019) *Participatory Budgeting* adalah konsep pelibatan masyarakat yang dipelajari secara luas dalam pemerintahan lokal atau sublokal melalui penyertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Sedangkan menurut Wampler, *Participatory Budgeting* diterjemahkan sebagai proses pengambilan keputusan mengenai distribusi sumber daya publik yang dirundingkan dan dinegosiasikan oleh warga negara. Ada empat dimensi kunci menurut Cabannes (2004) dalam *Participatory Budgeting* yaitu dimensi (1) partisipasi; (2) keuangan, fiskal dan anggaran; (3) legal normatif; dan (4) territorial. Adapun pelaksanaan *Participatory Budgeting* setidaknya harus memiliki prinsip-prinsip penting agar *Participatory Budgeting* dapat berfungsi yaitu partisipasi warga negara aktif (suara), meningkatkan otoritas warga negara (voting), realokasi sumber daya (keadilan sosial), dan peningkatan transparansi (pengawasan) (Wampler, 2020). Wampler (2020) menjelaskan bahwa *Participatory Budgeting* dilaksanakan atas instruksi pemerintah, warga, organisasi non pemerintah (NGOs), organisasi masyarakat sipil (CSO) yang memungkinkan warga negara agar berperan langsung memutuskan bagaimana dan dimana sumber daya seharusnya digunakan.

Participatory Budgeting cukup berkembang dalam 20 tahun terakhir. *Participatory Budgeting* dipelopori pertama kali di Brazil. Penganggaran partisipatif di Kota Porto Alegre dan Belo Horizonte di Brazil dianggap cukup sukses. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah karena kepercayaan kepada pemerintah lokal. Pajak daerah dinaikkan sehingga pemerintah lokal pendapatannya meningkat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui skema *Participatory Budgeting* (Souza, 2001). *Participatory Budgeting* di Brazil telah membukakan mata dunia dan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Shah (2007) menyebutkan bahwa *Participatory Budgeting* telah menciptakan peluang untuk warga negara dilibatkan, diedukasi, dan diberdayakan sehingga dapat mendorong masyarakat sipil lebih bersemangat. Menurut Ibrahim (2012), terdapat 6 (enam) manfaat utama dari *Participatory Budgeting* yaitu (1) Adanya demokrasi, dimana orang biasa dapat bersuara; (2) Adanya transparansi, yaitu ketika anggota masyarakat memutuskan bentuk pengeluaran melalui suara publik, hal ini memperkecil peluang terjadinya korupsi, pemborosan dan biaya mahal; (3) Pendidikan dimana setiap anggota masyarakat, staf dan pejabat belajar dengan praktek langsung. Masyarakat mendapatkan pengertian yang lebih dalam tentang isu politik yang kompleks dan kebutuhan masyarakat; (4) Efisiensi, yaitu keputusan anggaran menjadi lebih baik ketika mereka memanfaatkan pengetahuan dan pengawasan dari warga lokal; (5) Keadilan sosial, setiap warga negara mendapat akses yang sama untuk pengambilan keputusan, pada setiap tingkat masyarakat; (6) Komunitas, melalui pertemuan rutin, warga bisa mengenal tetangga mereka dan merasa saling terhubung dalam kota mereka. Organisasi di tingkat lokal menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melobi dan lebih banyak waktu untuk memutuskan kebijakan.

Transparansi fiskal merupakan komponen penting untuk mengurangi korupsi dan membangun sistem demokrasi yang adil dan setara dalam pengelolaan keuangan publik (Rahmawati & Supriatono, 2019). Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses penganggaran diharapkan dapat mencegah korupsi dalam penggunaan anggaran dan mendorong akuntabilitas anggaran.

Beberapa negara yang mengadopsi *Participatory Budgeting* merasakan dampak positifnya. Di Newyork terjadi perubahan alokasi anggaran berdasarkan keinginan masyarakat, di Republik Ceko, *Participatory Budgeting* telah berhasil meningkatkan jumlah peserta pemilu di negaranya. *Participatory Budgeting* telah menciptakan peluang untuk warga negara dilibatkan, diedukasi, dan diberdayakan sehingga dapat mendorong masyarakat sipil lebih bersemangat.

Konsep *Participatory Budgeting* di Indonesia, dapat dipahami dengan istilah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam konsep ini masyarakat diberikan ruang untuk ikut terlibat pada jenis dan tahapan perencanaan pembangunan dan telah secara resmi diatur dalam regulasi. Musrenbang didefinisikan oleh Sukardi (2009) sebagai kegiatan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus pada sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/Lembaga/unit kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah serta masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional dan daerah.

Pada tahapan musrenbang, masyarakat Indonesia mempunyai peran intervensi. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten dimana masyarakat bisa berpendapat dan memberikan masukan atas perencanaan pembangunan.

Namun demikian, sekalipun masyarakat telah dilibatkan dalam tahapan perencanaan anggaran, di Indonesia pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran baru sebatas pada tingkat supersifisial belum benar-benar sebagai elan vital dalam pengambilan kebijakan secara demokratis (Pheni, 2005). Menurut Salahudin (2012), anggaran partisipasi di Indonesia hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman bukan *political will* para *stakeholder*, sedangkan menurut Hagelskamp et al. (2020) menyebutkan bahwa *Participatory Budgeting* di Indonesia mengalami permasalahan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam *Participatory Budgeting*.

Hasil pengamatan Sukardi (2009) menunjukkan bahwa kelompok yang mewakili berbagai organisasi sosial kemasyarakatan melihat bahwa kebijakan partisipatif seperti musrenbang yang dijadikan "medan magnet" untuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran lebih menggambarkan kegiatan seremonial belaka. Berbagai faktor penyebab yaitu bahwa banyak usul dari masyarakat dikalahkan dengan banyak kepentingan dan kekuatan lain yang dianggap jauh lebih penting dari usul masyarakat. Usulan dari masyarakat dianggap kurang realistis, tidak ekonomis dan tidak ada dalam mata anggarannya, tidak sinkron dengan program pembangunan daerah dan pusat. Sukardi berpendapat bahwa persoalan partisipasi masyarakat di Indonesia bukan terletak pada tidak adanya komitmen nasional atau legitimasi legal tetapi terletak pada konsistensi para pelaksana bagaimana komitmen tersebut dilaksanakan.

Participatory Budgeting menjadi bidang studi yang kaya dan menantang karena tidak ada pengalaman yang persis sama dengan pengalaman lainnya (Cabannes, 2004), namun *Participatory Budgeting* dibutuhkan dan diadopsi oleh negara-negara di dunia dan tidak mengenal apakah paling baik diterapkan pada negara maju atau negara berkembang, keduanya membutuhkan *Participatory Budgeting*. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman negara-negara di dunia yang telah menerapkan *Participatory Budgeting*?

Masih sedikit tulisan yang mengulas implementasi *Participatory Budgeting* di berbagai belahan dunia secara sekaligus. Sebagian besar ulasan tentang *Participatory Budgeting* dilakukan hanya pada satu atau dua negara saja. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas pelaksanaan *Participatory Budgeting* di beberapa negara yang mewakili Benua Amerika, Benua Eropa, Benua Asia dan Benua Afrika untuk melihat bagaimana *lesson learned* dari negara tersebut yang bisa diterapkan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan melalui *literature review* dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal internasional, dan informasi lain yang relevan. Berdasarkan literatur penelitian yang sudah ada sebelumnya akan diulas pelaksanaan *Participatory Budgeting* di beberapa negara. Dari hasil studi diperoleh informasi bahwa *Participatory Budgeting* telah diimplementasikan oleh negara-negara di 4 (empat) benua yaitu di Benua Amerika diwakili oleh Amerika Serikat (New York) dan Brazil (Porto Alegre dan Belo Horizonte), di Benua Eropa diwakili oleh Polandia dan Republik Ceko, Di Benua Asia diwakili oleh China (Wenling dan Wuxy) dan India (Kerala). Adapun di Benua Afrika

diwakili oleh Mesir. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) yang diulas oleh (Pristiandaru, 2022) negara-negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang (Tabel 1). Negara yang masuk kategori negara maju berdasarkan kriteria IMF dipilih berdasarkan produk domestik bruto (PDB), diversifikasi ekspor, dan terintegrasi dalam sistem keuangan global.

Tabel 1. Pengelompokan Negara yang melaksanakan *Participatory Budgeting* (Pristiandaru, 2022)

Benua	Kelompok Negara Maju	Kelompok Negara Berkembang
Amerika	Amerika Serikat	Brazil
Eropa	Republik Ceko	Polandia
Afrika	-	Mesir
Asia	-	China, India

Hasil dan Pembahasan

Participatory Budgeting di Brazil

Pada tahun 2001, Souza, Profesor Administrasi Publik dari Brazil telah membuat penelitian tentang *Participatory Budgeting* di Porto Alegre dan Belo Horizonte dalam rangka meriviu bagaimana implementasi *Participatory Budgeting* pada dua kota tersebut. Pelaksanaan PB di Porto Alegre diawali dengan para pejabat pemerintah daerah dan bagian perencanaan menjelaskan mengenai situasi pendapatan dan pengeluaran dan jumlah anggaran untuk PB. Pertemuan selanjutnya membahas prioritas-prioritas yang disepakati, menyatukan semua keinginan setiap sub distrik, memilih perwakilan delegasi untuk forum distrik yang dikenal sebagai PB distrik. Setelah delegasi distrik terpilih, prioritas diorganisir, dipilih perwakilan untuk membuat prioritas masalah dalam rapat di kecamatan.

Tujuannya untuk memberikan gambaran umum permasalahan dari setiap distrik dan melihat pandangan yang lebih luas melalui masalah kabupaten lain. Tujuan lainnya yaitu untuk mencegah kecenderungan delegasi dari subdistrik memilih hal yang terlalu spesifik. Forum di distrik ini merupakan fase musyawarah *Participatory Budgeting* dan disini daftar prioritas dibuat. Disini juga dipilih anggota panitia yang akan menindaklanjuti dan mengawasi pekerjaan pada saat diimplementasikan. Fase terakhir adalah forum kota dimana tempat *Participatory Budgeting* diresmikan. Prioritas tiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap komunitas.

Salah satu faktor sukses dalam pelaksanaan partisipasi *Participatory Budgeting* di Brazil yaitu penduduk di Porto Alegre ternyata memiliki tingkat asosiasi yang tinggi, terlibat dalam aktivitas nasional dan kesadaran politik yang tinggi serta kepercayaan komunal jika dibandingkan dengan penduduk lainnya di sebagian besar kota di Brazil. Di Belo Horizonte, prioritas didaftar oleh peserta dalam bentuk kuesioner. Di Porto Alegre dalam penerapan *Participatory Budgeting* dibuat kriteria untuk menentukan prioritas jika secara teknis tidak dapat dijalankan, maka usulan tersebut ditolak, preferensi anggaran diberikan untuk pekerjaan yang sedang berlangsung. Setiap prioritas diberi nilai dan diperingkat. Tidak seluruh anggaran dipengaruhi dari keputusan peserta PB. Prioritas PB saat itu di Porto Alegre yaitu jalan, saluran air limbah, perumahan dan peralatan masyarakat sedangkan di Belo Horizonte yaitu perumahan, saluran pembuangan, pengerasan jalan, urbanisasi kota, kesehatan dan pendidikan.

Surbakti (2005) menjelaskan ada 2 (dua) faktor mengapa seseorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik. Faktor pertama yaitu kesadaran politik dan kedua adalah kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Surbakti menjelaskan kesadaran ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat Ia hidup. Sedangkan kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Knobloch et al. (2020) menjelaskan bahwa perubahan sikap politik yang terbesar akan terjadi pada mereka yang paling sadar akan proses dan hasilnya. Oleh karena itu kesadaran warga atas hasil/dampak dapat membawa perubahan sikap politik seseorang. Jika dikaitkan dengan *Participatory Budgeting*

partory Budgeting maka, hasil *Participatory Budgeting* yang memberikan dampak pada masyarakat dapat merubah kesadaran politik masyarakat. *Participatory Budgeting* telah menunjukkan bahwa seringkali apa yang dianggap penting oleh pejabat publik belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kehadiran *Participatory Budgeting* juga dapat menjadi alat untuk mencegah dilaksanakannya janji-janji politik sebagai iming-iming pejabat publik agar terpilih oleh rakyat. *Participatory Budgeting* menjadikan dana publik lebih transparan dan akuntabel sehingga berdampak pada pembangunan suatu wilayah.

Participatory Budgeting di Amerika Serikat

Dalam *Participatory Budgeting*, warga biasa yang bukan pejabat publik dapat ikut terlibat untuk memutuskan alokasi anggaran di wilayahnya. Warga dapat memutuskan uang publik akan dibelanjakan kemana. Dalam *Participatory Budgeting*, terdapat kecenderungan apa yang diputuskan oleh publik berbeda dengan apa yang diprioritaskan oleh pejabat publik. Prioritas menjadi bergeser ketika warga terlibat langsung dalam penganggaran. Hal ini, salah satunya terjadi di New York, hasil penelitian Hagelskamp et al. (2020) menunjukkan bahwa terjadi pergeseran anggaran ketika sebuah wilayah menerapkan *Participatory Budgeting*. Penelitian tersebut mengungkapkan dalam delapan tahun (2011-2018) di Newyork terjadi perbedaan alokasi anggaran publik dari semula dianggarkan oleh pejabat publik adalah untuk taman dan rekreasi, pelestarian perumahan dan proyek pengembangan, bergeser prioritas untuk sekolah, jalan dan perbaikan lalu lintas serta perumahan.

Fase pertama *Participatory Budgeting* di New York dimulai dengan warga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, fase kedua yaitu delegasi atau perwakilan dari masyarakat mengembangkan ide-ide proyek dan prioritas penganggaran ke dalam proposal proyek. Dalam membuat proposal ini, perwakilan sering berkolaboratif dengan perwakilan pemerintah. Fase berikutnya yaitu fase ketiga adalah tahap pemungutan suara, suara publik memutuskan prioritas Anggaran. Warga boleh memilih alokasi proporsional untuk bidang kebijakan atau pada proyek konkret yang muncul dalam pengembangan proyek. Di dalam tahap implementasi, pemerintah melaksanakan prioritas dan proyek berdasarkan pilihan masyarakat

Participatory Budgeting di New York dilakukan setiap tahun dengan melanjutkan fase terakhir dari pembahasan *Participatory Budgeting* tahun sebelumnya. Hagelskamp et al. (2020) menunjukkan *Participatory Budgeting* di New York telah berhasil melibatkan masyarakat terpinggirkan. Masyarakat yang secara tradisional terpinggirkan terlibat tidak hanya dalam pemungutan suara tetapi juga selama ide dan pengembangan proyek. Selain itu *Participatory Budgeting* di New York telah melibatkan komunitas yang kehilangan haknya.

Participatory Budgeting di Republik Rakyat Cina

Pengambilan keputusan anggaran akan menentukan program pemerintah mana yang dapat didanai dan kebijakan apa yang bisa dipraktikkan, kemudian akan menentukan distribusi sumber daya publik dan akhirnya mengungkapkan tujuan politik sebuah pemerintahan negara (Wu & Wang, 2012). Praktik anggaran publik terkait erat dengan legitimasi pemerintahan negara. *Participatory Budgeting* diperkenalkan di China pada tahun 2005 oleh China Yayasan Riset Pembangunan (CDRF). Kota pertama yang mengadopsi *Participatory Budgeting* yaitu Wenling di provinsi Zhejiang, Wuxi di Provinsi Jiangsu, Haerbin di Provinsi longjiang, dan Shanghai. PB lebih dulu diperkenalkan sebagai *pilot project* di beberapa distrik, kota, atau kabupaten di kota-kota tersebut, misalnya, Kota Xinhe dan Kota Zeguo di Wenling, kemudian tahun 2010 kota yang bergabung dalam PB menjadi lebih banyak, termasuk salah satunya Jiaozuo di Henan.

Wu dan Wang (2012) melakukan penelitian tentang pelaksanaan PB yang cukup sukses di China yaitu di Kota Wuxi dan Wenling. Penelitian Wu dan Wang (2012) mengungkapkan kesuksesan *Participatory Budgeting* di kedua kota ini menggunakan pendekatan yang berbeda. *Participatory Budgeting* dilaksanakan di Wenling sebagai sebuah reformasi untuk memperkuat keterlibatan cabang legislatif dalam pengambilan keputusan fiscal dan merangsang keterlibatan warga dalam musyawarah kongres. Di Wuxi, *Participatory Budgeting* lebih focus pada pemberdayaan warga, bukan Kongres Rakyat, untuk membuat keputusan penganggaran pada proyek modal. *Participatory Budgeting* diadopsi di Wuxi untuk mengalokasikan kembali investasi di bidang-

bidang seperti perlindungan lingkungan dan rehabilitasi, pengembangan budaya, perawatan medis, keamanan, pendidikan, dan berbasis rumah merawat orang tua, memberi manfaat bagi 800.000 warga. Di Wenling, penerapan *Participatory Budgeting* efektif untuk mendorong meningkatkan legitimasi dalam penganggaran publik di pemerintah daerah, di Wenling penerimaan warga menjadi lebih besar karena warga diberikan hak untuk merancang prosedur partisipasi. Kedua kota ini mempromosikan proses *Participatory Budgeting* untuk mendapatkan keuntungan atas persetujuan warga dan pejabat pemerintah pada prioritas anggaran.

Hasil survei dalam penelitian Wu dan Wang (2012) menunjukkan lebih dari 90 persen responden sampel setuju bahwa dana publik dalam *Participatory Budgeting* yang ditangani adalah permasalahan lokal yang paling mendesak. Masyarakat telah mendapat manfaat dari proyek-proyek ini. Hasil survey di Wuxy menunjukkan bahwa ada lebih dari 80 persen responden menyatakan puas dengan proyek infrastruktur publik yang dipilih melalui *Participatory Budgeting*. Pelaksanaan *Participatory Budgeting* meningkatkan transparansi fiskal dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat umum, memastikan bahwa dana public dialokasikan sesuai dengan pandangan kebutuhan public.

***Participatory Budgeting* di Republik Ceko**

Participatory Budgeting muncul di Republik Ceko pada tahun 2014. *Participatory Budgeting* diciptakan sebagai instrumen untuk memberdayakan warga, namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Kukučková and Bakoš (2019), *Participatory Budgeting* disebutkan sebagai sebuah ornamen bukan instrumen. Implementasi penganggaran partisipatif menciptakan ilusi partisipasi daripada benar-benar meningkatkan kualitas lokal pemerintahan (Minarik, 2020). Dalam proses pemilu di Republik Ceko, rendahnya partisipasi publik mendorong Pemerintah untuk menggunakan *Participatory Budgeting* dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Kehadiran *Participatory Budgeting* di Ceko diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan partisipasi publik atau “krisis demokrasi” khususnya dalam pemilu lokal. Data kuantitatif menunjukkan *Participatory Budgeting* di Ceko sangat terbatas, dalam hal alokasi keuangan dalam anggaran kota dan dalam hal partisipasi warga. Menurut peneliti kemungkinan disebabkan oleh *Participatory Budgeting* di negara tersebut masih relatif baru.

Berdasarkan studi yang dilakukan Kukučková and Bakoš (2019), implementasi *Participatory Budgeting* di Ceko telah meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu. Penerapan *Participatory Budgeting* meningkatkan persentase partisipasi pemilih di pemilihan tingkat kota sebesar 3 poin dan sekitar 1,2 poin di tingkat pemilihan parlemen, sehingga bisa disimpulkan penggunaan *Participatory Budgeting* berpengaruh positif pada pemilih. Ini membuktikan bahwa *Participatory Budgeting* dapat meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada, tetapi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk dianalisis lebih dalam. Kukučková and Bakoš (2019) menjelaskan memecahkan “krisis demokrasi” dengan menggunakan *Participatory Budgeting* saja tidak memungkinkan, politisi lokal harus lebih berhati-hati dan tidak menganggap *Participatory Budgeting* sebagai instrumen ideal untuk mendorong partisipasi sipil di dalam semua keadaan.

Minárik (2020) menggambarkan proses penganggaran *Participatory Budgeting* di Republik Ceko diawali dengan Majelis Kota mengalokasikan dana dalam anggaran kota untuk *Participatory Budgeting* kemudian warga diminta mengajukan proposal proyek investasi. Proposal dibahas di forum publik antara warga dan pemerintah kota untuk memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dari perspektif teknis dan hukum. Di akhir, warga akan memilih yang mana proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Prosedur pemungutan suara bervariasi antar kotamadya, beberapa hanya mengizinkan penduduk resmi setempat untuk memilih, yang lainnya lebih inklusif. Sebanyak 29 kota di Ceko yang telah menerapkan penganggaran partisipatif di tingkat kota. Hal ini menurut peneliti mungkin dikarenakan partisipasi warga biasa kemungkinan lebih mudah berada di kota kecil dan desa. Meski demikian, ada pengecualian pada pola umum dan *Participatory Budgeting* yang telah diterapkan di banyak kota kecil (dengan populasi di bawah 5000 penduduk). Di Ceko, sangat sedikit proyek yang diajukan dalam *Participatory Budgeting* dan semua atau hampir semua proyek yang diajukan diterima untuk dibiayai. Puluhan kota di Ceko telah menerapkan *Participatory Budgeting*, padahal, implementasinya sangat terbatas baik dari

segi alokasi keuangan, ruang lingkup dan keterlibatan khalayak ramai dan ketidakjelasan bagaimana anggaran partisipatif diperkenalkan.

Participatory Budgeting di Polandia

Pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Polandia tidak terlalu menarik bagi warganya. Dalam penelitian Madej (2019), pelaksanaan *Participatory Budgeting* menunjukkan hanya sedikit keterlibatan masyarakat, meskipun pemerintah lokal telah berupaya untuk mendorong aktivitas warga untuk berpartisipasi dalam *Participatory Budgeting*. Otoritas lokal telah berupaya untuk mengatur pemungutan suara dengan cara yang paling ramah warga. Bahkan delapan belas kota yang dianalisis telah menyediakan kemungkinan untuk warganya dapat memilih secara online, 14 kota diantaranya telah membagikan surat suara untuk memastikan bahwa penduduk yang tidak ingin berpartisipasi melalui internet dapat mengambil bagian dalam pemilihan proyek di kotanya. Sedangkan empat kota lainnya membuat iklan, sarana konsultasi dan *help desk* untuk warga yang kesulitan memilih dalam bentuk virtual. Bahkan dalam dua kasus, warga juga diizinkan memberikan suara secara langsung dalam pertemuan khusus di Gorzow Wielkopolski atau dengan datang ke kantor pemerintah kota.

Namun demikian, menurut Madej (2019), hasil analisis menunjukkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan antara suara dan jumlah populasi kota, hal ini berlaku sama di kota-kota besar. Penduduk yang berpartisipasi masih cukup rendah. Meskipun cara penghitungan masing-masing kota ada yang tidak seragam, misalkan penduduk yang tidak terdaftar secara resmi (bukan ber-ktp setempat) tidak dihitung, walaupun beberapa kota mengizinkan semua penduduk untuk memilih dalam penganggaran partisipatif, terlepas dari status formal mereka, jumlahnya penduduk yang ikut berpartisipasi tetap cukup rendah. Padahal potensi demokrasi dan partisipasi secara langsung penting dalam *Participatory Budgeting*.

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kekecewaan masyarakat karena tidak dilibatkan dalam proses sebelum dilakukannya pemilihan. Madej menggarisbawahi perlu adanya proses *bottom-up* dengan mengundang aktivis pada sub lokal untuk mengatasi masalah di tingkat terendah pemerintah kota. Kantor kotamadya sebaiknya hanya menyediakan kerangka kerja dan mendukung inisiatif dan proyek tertentu yang diusulkan penduduk. Hal lainnya yang mempengaruhi rendahnya partisipasi warga yaitu alokasi pengeluaran dana untuk *Participatory Budgeting* cukup kecil dari total pengeluaran yang ada. Madej (2019) menyebutkan tidak ada dari 18 kota yang dianalisis yang mengalokasikan lebih dari 1% anggaran pengeluaran keseluruhan untuk *Participatory Budgeting*, meskipun konsep *Participatory Budgeting* menarik bagi warga. Rendahnya tingkat pendanaan dapat menghambat partisipasi dalam jangka panjang.

Menurut Shybalkina-Bifulco dalam Madej (2019), penganggaran partisipatif dirancang untuk meningkatkan inklusi sosial dan mendukung kelompok yang terpinggirkan atau berisiko terpinggirkan, meskipun dampak dari inisiatif tersebut pada redistributif belum terbukti secara jelas dan membutuhkan analisis lebih lanjut (Hong-Shine, 2018). Namun, di antara tujuan lainnya, *Participatory Budgeting* dimaksudkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan di dalam kota dan ketegangan antara pusat kota dan warga pinggiran agar pembangunan lebih berkelanjutan. Jadi perlu ada suatu revitalisasi pembangunan untuk mendukung warga yang terpinggirkan dan kelompok yang terpengaruh akibat kurangnya investasi. Warga pinggiran seharusnya mempunyai wewenang sebagai pemain penting. Sayangnya berdasarkan analisis Madej, *Participatory Budgeting* tidak digunakan untuk proyek-proyek revitalisasi tersebut di kota besar. Hal ini tidak berarti bahwa otoritas kota tidak peduli tentang revitalisasi, namun mereka tidak menggunakan *Participatory Budgeting* untuk mendorong revitalisasi.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam *Participatory Budgeting* juga disampaikan oleh Bednarska-Olejniczak dan Olejniczak (2017). Dalam penelitian tentang *Solecky Fund* yang diklaim sebagai salah satu bentuk *Participatory Budgeting* di Polandia, Bednarska-Olejniczak dan Olejniczak (2017) menunjukkan tingkat keterlibatan warga dalam proses partisipasi cukup rendah. Penelitian tersebut mendapati bahwa beberapa penyebabnya antara lain dikarenakan pengetahuan masyarakat yang tidak memadai tentang prosedur *Solecky Fund*, kompleksitas prosedur dan frekuensi pengambilan keputusan dalam satu pertemuan di mana proyek dipresentasikan,

didiskusikan, dan dipilih. Solusi terhadap masalah ini menurut Bednarska-Olejniczak dan Olejniczak (2017) yaitu masyarakat butuh edukasi tentang prosedur *Solecky Fund*, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur wajib, memperkenalkan beberapa tahap prosedur pemilihan proyek dalam *Solecky Fund* serta memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi dan voting sebelum proyek disubmit.

Participatory Budgeting di Mesir

Ibrahim (2012) mengatakan bahwa di Mesir, ada banyak proyek yang mendorong partisipasi warga, terutama dalam proyek yang didanai oleh organisasi internasional seperti GIZ (GTZ), Agha Khan di proyek Darb Al Ahmar, dan proyek organisasi non-pemerintah lainnya. Namun, masalah utamanya adalah bahwa proyek-proyek yang telah berlangsung tersebut tidak menjamin representasi dari semua kelompok penduduk. Selain itu, anggaran yang dibicarakan ternyata bukan bagian dari anggaran nasional tetapi merupakan dana eksternal. Adapun untuk memantau pelaksanaan anggaran dan proyek yang disetujui, harus dilaksanakan menurut masing-masing kota melalui mekanisme, termasuk dewan *Participatory Budgeting*.

Partisipasi sektor swasta dalam *Participatory Budgeting* di Mesir secara formal dibatasi, namun, di beberapa kota, sektor swasta terkadang memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan di *Participatory Budgeting*. Sektor industri, komersial, dan jasa menjadi bagian Kongres Kota di Belem, yaitu dengan tiga dari 50 perwakilan. Ibrahim menyimpulkan partisipasi di negara berkembang khususnya di Mesir masih kurang memadai karena cenderung tidak mewakili secara luas populasi dan tidak mampu melibatkan dialog yang dapat mempengaruhi publik untuk mengambil keputusan. Menurut Ibrahim (2012), masyarakat sipil dan LSM dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan partisipasi.

Chowdhury et al. (2020) menjelaskan cara untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat yaitu dengan memberdayakan *NonGovernment Organization* (NGO) atau yang disebut LSM. Chowdhury et al. (2020) mengambil studi kasus pada *the Bangladesh Rural Advancement Committee* (BRAC) yang merupakan LSM terkemuka di Bangladesh dan menemukan bahwa dengan program dan proyek LSM di seluruh negeri di Bangladesh ternyata berdampak (i) menciptakan kesadaran sosial dan politik di antara kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan secara sosial, (ii) menilai kebutuhan dan permintaan kelompok orang tersebut, dan (iii) melatih dan mendorong mereka menuju kegiatan berorientasi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Sejumlah besar program LSM yang beraneka macam yang meliputi keuangan mikro, pendidikan, kesehatan, hukum, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan bisnis sosial, berkontribusi pada perubahan sosial dan pembangunan yang positif di Bangladesh.

Kembali ke Mesir, menurut Ibrahim (2012), Dimensi partisipatif dianggap sebagai faktor vital dalam Proses "*Participatory Budgeting*". Banyak pertimbangan yang harus dipenuhi termasuk melibatkan representasi masyarakat dalam semua kategori dalam masyarakat tanpa mengecualikan satu kelompok tertentu. Selain itu, partisipasi untuk semua kelompok ini tidak boleh terbatas pada tahap pengambilan keputusan dan alokasi anggaran akhir tetapi harus diperluas ke tahap implementasi, tindak lanjut dan pemantauan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menciptakan kerangka kerja administrasi yang fleksibel untuk menjamin keberlanjutan *Participatory Budgeting*. Selain itu penelitian menemukan bahwa mengintegrasikan sektor swasta dalam proses *Participatory Budgeting* dapat memastikan arah investasi mereka ke jalur yang benar dan menjamin dukungan dari masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang tergabung.

Participatory Budgeting di India

Di India *Participatory Budgeting* telah diadopsi di banyak tempat atas inisiatif mereka sendiri. Kerala merupakan negara bagian di India yang menerapkan *Participatory Budgeting* di seluruh unit pemerintahannya mulai dari desa, kelurahan sampai kabupaten. Setelah dua dekade lebih, *Participatory Budgeting* telah dilembagakan, bertahan dari banyak perubahan partai yang berkuasa di tingkat negara bagian (Blair, 2020).

Dalam penelitian Blair (2020), *Participatory Budgeting* dimulai dengan pertemuan secara terbuka dan bertahap dan didukung oleh personil kunci yang terlatih. Kerala Sastra Sahitya Parishad

(KKSP) merupakan CSO terbesar di Kerala membantu menyediakan pelatihan kepada personil kunci sebagai fasilitator dan penasehat teknis dalam *Participatory Budgeting* di Kerala. Prioritas anggaran ditetapkan di tingkat lingkungan, kemudian delegasi yang ditunjuk bertemu dengan pejabat otoritas yang dipilih untuk membentuk anggaran terpadu. Selain itu dibentuk kelompok kerja sektoral untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek. Setelah proyek disetujui, proyek dilaksanakan dan dipantau oleh delegasi terpilih. Hasil pemantauan dilaporkan untuk proses berikutnya.

Kunci keberhasilan *Participatory Budgeting* di Kerala karena kualitas pemerintahan secara keseluruhan sangat baik dibandingkan dengan bagian lain di India. Partai politik berusaha menjangkau dukungan masyarakat dari semua lapisan penduduk dan etnis. Kerala memiliki kepemimpinan yang kuat yang mendukung *Participatory Budgeting* dan kehadiran CSO yang kuat. Di sisi lain, implementasi *Participatory Budgeting* tidak terlalu baik di kota-kota India lainnya meskipun beberapa kota besar di India telah mencoba penganggaran partisipatif. Sebagai contoh di Pune. Implementasi *Participatory Budgeting* dimulai dengan pemasangan iklan di koran yang meminta saran warga atas investasi publik. Warga diminta memberikan sarannya melalui sebuah formulir dan warga yang memasukkan sarannya diundang. Sayangnya, peran warga hanya sebatas memberikan saran dan tidak ada tindak lanjut atas saran tersebut. Alokasi dana yang diberikan dalam *Participatory Budgeting* juga terbatas. Warga tidak dilibatkan dalam menentukan prioritas anggaran yang akan digunakan dan tidak dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan penggunaan dananya. Selain itu tidak ada pertanggungjawaban dari birokrat kepada warganya. Hal lainnya yaitu tidak ada dukungan dari Walikota.

Simpulan

Berdasarkan ulasan tersebut, cukup jelas bahwa tingkat partisipasi publik dalam proses *Participatory Budgeting* memegang factor kunci. Penduduk di Porto Alegre misalnya, memiliki tingkat asosiasi yang tinggi, terlibat dalam aktivitas nasional, memiliki kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan komunal yang tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di kota-kota Brazil lainnya. Namun tidak semua orang ingin terlibat dalam *Participatory Budgeting*. Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu adanya kekecewaan masyarakat karena tidak dilibatkan dalam proses awal *Participatory Budgeting* sebelum dilakukannya pemilihan (Polandia), rendahnya jumlah anggaran *Participatory Budgeting* yang dialokasikan pemerintah (Polandia, Pune - India), regulator membatasi penggunaan dana *Participatory Budgeting* untuk proyek yang diinginkan masyarakat (Polandia, Pune - India), tidak memadainya pengetahuan masyarakat tentang prosedur *Participatory Budgeting* (Polandia, Pune- India) dan prosedur *Participatory Budgeting* terlalu kompleks (Polandia), partisipasi masyarakat tidak mewakili semua kelompok penduduk (Mesir), tidak melibatkan dialog publik (Mesir), dan ketidakjelasan *Participatory Budgeting* karena adanya motif politis dari pemerintah (Republik Ceko).

Pada negara yang tingkat partisipasi masyarakat dalam *Participatory Budgeting* cukup tinggi, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat diantaranya adalah kesadaran politik masyarakat yang sangat tinggi dalam semua lapisan (Brazil). melibatkan semua lapisan masyarakat baik masyarakat termasuk kaum minoritas dan termarginalkan (Brazil, New York), komitmen pemerintah untuk menjalankan proyek berdasarkan pilihan masyarakat (New York, China), warga diberikan hak untuk merancang prosedur partisipasi (China), adanya komunikasi warga dan pemerintah (China). Ditemukan juga bahwa LSM dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan partisipasi (Kerala - India), proyek dilaksanakan dan dilakukan pemantauan (Kerala - India).

Hasil penelitian ini perlu diuji lebih lanjut mengingat kondisi dan permasalahan setiap negara tidak sama. Selain itu penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan literatur dari penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh sangat terbatas pada hasil penelitian para pakar/akademisi tersebut dan tahun dimana setiap negara mengimplementasikan *Participatory Budgeting* berbeda. Hasil revidi dari berbagai negara yang melaksanakan *Participatory Budgeting* perlu disesuaikan secara kontekstual di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan

latar belakang perekonomian, budaya, regulasi dan kondisi politik dan lain-lain yang berbeda di setiap negara.

Beberapa saran yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan implementasi *Participatory Budgeting* yaitu dengan cara; (1) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan meningkatkan peran *NonGovernment Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat, meningkatkan jejaring sosial dan memberdayakan akademisi. Selain itu kebijakan yang telah dibuat harus memberikan dampak nyata sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri; (2) Melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk kaum minoritas dan termarjinalkan; (3) Meningkatkan komitmen pemerintah untuk menjalankan proyek berdasarkan pilihan masyarakat; (4) Warga diberikan hak untuk merancang prosedur partisipasi; (5) Adanya komunikasi warga dan pemerintah; (6) Melibatkan unsur masyarakat sejak awal *Participatory Budgeting* akan diterapkan; (7) Pemerintah menyediakan jumlah alokasi anggaran untuk *Participatory Budgeting* yang memadai bagi masyarakat; (8) Regulator tidak membatasi penggunaan anggaran *Participatory Budgeting* untuk sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat; (9) Partisipasi tidak hanya melalui voting tetapi perlu ada dialog dan komunikasi masyarakat dengan pemerintah; (10) Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan staf yang berdedikasi dan terlatih.

Daftar Pustaka

- Bednarska-Olejniczak, D., & Olejniczak, J. (2017). Participatory budgeting in Poland—finance and marketing selected issues. *Hradec Economic Days, January*, 55–67. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/87659/>
- Bennis, W. (2006). *Moral leadership: The theory and practice of power, judgment and policy* (Vol. 139). John Wiley & Sons.
- Blair, H. (2020). Accountability through participatory budgeting in India: Only in Kerala? In S. Cheema (Ed.), *Advances in 21st Century Human Settlements* (pp. 57–76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_3
- Cabannes, Y. (2004). *Participatory budgeting: conceptual framework and analysis of its contribution to urban governance and the millenium development goals*. Un-Habitat.
- Chowdhury, T. A., Das, A. B., Chakraborty, L., & Barai, M. K. (2020). NGOs for development: experience of Bangladesh. In M. K. Barai (Ed.), *Bangladesh's Economic and Social Progress* (pp. 351–380). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1683-2_12
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709765>
- Hagelskamp, C., Silliman, R., B. Godfrey, E., & Schleifer, D. (2020). Shifting priorities: participatory budgeting in New York City is associated with increased investments in schools, street and traffic improvements, and public housing. *New Political Science*, 42(2), 171–196. <https://doi.org/10.1080/07393148.2020.1773689>
- Halvorsen, K. E. (2003). Assessing the effects of public participation. *Public Administration Review*, 63(5), 535–543. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00317>
- Ibrahim, A. A. A. M. (2012). Guidelines for applying budgeting as a tool for participatory democracy in Egypt. In M. Pacetti & G. Passerini (Eds.), *Sustainable City 2022* (pp. 255–266). <https://doi.org/10.2495/SC120221>
- Knobloch, K. R., Barthel, M. L., & Gastil, J. (2020). Emanating effects: The impact of the Oregon citizens' initiative review on voters' political efficacy. *Political Studies*, 68(2), 426–445. <https://doi.org/10.1177/0032321719852254>
- Kukučková, S., & Bakoš, E. (2019). Does participatory budgeting bolster voter turnout in elections? The case of the Czech Republic. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 12(2), 109–129. <https://doi.org/10.2478/nispa-2019-0016>
- Madej, M. (2019). Participatory budgeting in the major cities in Poland – Case study of 2018 editions. *Politics in Central Europe*, 15(2), 257–277. <https://doi.org/10.2478/pce-2019-0017>

- Minárik, P. (2020). Participatory budgeting and traditional participation in Czech municipalities. *Slovak Journal of Political Sciences*. <https://doi.org/10.34135/sjps.200102>
- Pheni, C. (2005). *Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi*. Kemitraan Partnership.
- Pristiandaru, D. L. (2022). *Daftar negara maju dan negara berkembang di dunia*. Kompas.Com. <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/05/143000070/daftar-negara-maju-dan-negara-berkembang-di-dunia>
- Rahmawati, S. M., & Supriatono, B. (2019). Implementasi penganggaran partisipatif di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.150>
- Salahudin, S. (2012). *Korupsi, demokrasi dan pembangunan daerah*. LAPINDA BIDOS NTB.
- Shah, A. (2007). *Participatory budgeting. Public sector governance and accountability*. World Bank.
- Souza, C. (2001). Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in building democratic institutions. *Environment and Urbanization*, 13(1), 159–184. <https://doi.org/10.1177/095624780101300112>
- Sukardi, A. (2009). *Participatory governance dalam pengelolaan keuangan daerah*. LaksBang.
- Surbakti, R. (2005). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Wampler, B. (2020). Participatory budgeting: Core principles and key impacts. *Journal of Deliberative Democracy*, 8(2). <https://doi.org/10.16997/jdd.138>
- Wu, Y., & Wang, W. (2012). Does participatory budgeting improve the legitimacy of the local government?: A comparative case study of two cities in China. *Australian Journal of Public Administration*, 71(2), 122–135. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2012.00771.x>